

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

*Kabupaten Bondowoso*

2020



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

*Kabupaten Bondowoso*

**2020**



**Indikator Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Bondowoso  
2020**

<b>ISSN</b>	<b>: 2776-8724</b>
<b>No. Publikasi</b>	<b>: 35110.2130</b>
<b>Katalog</b>	<b>: 4102004.3511</b>
<b>Ukuran Buku</b>	<b>: 21 Cm x 29,7 Cm</b>
<b>Jumlah Halaman</b>	<b>: x + 54 halaman</b>
<b>Naskah</b>	<b>: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik</b>
<b>Penyunting</b>	<b>: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik</b>
<b>Desain Kover</b>	<b>: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik</b>
<b>Ilustrasi Kover</b>	<b>: Salah Satu Indikator Kesejahteraan Rakyat</b>
<b>Diterbitkan Oleh</b>	<b>: BPS Kabupaten Bondowoso</b>

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## **TIM PENYUSUN**

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BONDOWOSO 2020**

### **Penanggung Jawab**

Mohamad Isma'il, S.Si., M.Ec.Dev.

### **Penyunting**

Eko Nugroho, SST

### **Penulis dan Pengolah Data**

Lucy Efendi, SST

### **Desain Layout**

Lucy Efendi, SST

## KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2020” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dinas/instansi di Kabupaten Bondowoso. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, PDRB dan Sensus Penduduk.

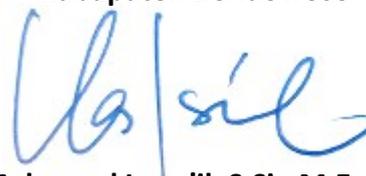
Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

**Bondowoso, November 2021**

**Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bondowoso**



**Mohamad Isma'il, S.Si., M.Ec.Dev**  
**NIP. 19770713 199901 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER .....	i
KATALOG.....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Sumber Data.....	5
1.5 Sistematika Penyajian.....	5
II. KEPENDUDUKAN.....	7
2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	10
2.2 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk.....	11
2.3 Angka Beban Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio</i> ).....	12
2.4 Fertilitas.....	13
2.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	17
III. KESEHATAN.....	19
3.1 Sarana Kesehatan.....	21
3.2 Angka Harapan Hidup (AHH) .....	22
3.3 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan.....	24
3.4 Penolong Kelahiran.....	25
3.5 Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	27
3.6 Imunisasi Balita.....	28

IV. PENDIDIKAN.....	31
4.1 Fasilitas Pendidikan.....	34
4.2 Partisipasi Sekolah.....	35
4.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan.....	36
4.4 Angka Melek Huruf (AMH).....	37
4.5 Harapan lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	38
4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	40
 V. PERUMAHAN.....	 43
5.1 Status Kepemilikan dan Keterangan Bangunan Tempat Tinggal.....	45
5.2 Keterangan Sumber Air Minum.....	46
5.3 Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak.....	47
 VI. INDIKATOR LAINNYA.....	 49
6.1 Pengeluaran Penduduk.....	51

## DAFTAR TABEL

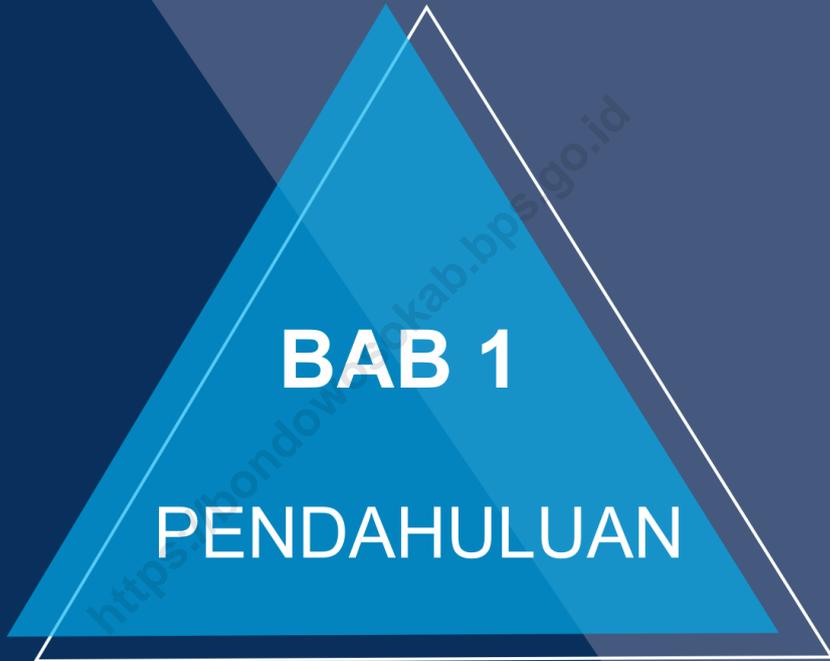
	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020.....	10
Tabel 2.2 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bondowoso Per Kilometer Persegi, 2011-2020.....	12
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2019-2020.....	13
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.....	14
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Perempuan Berusia 10 tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2019-2020.....	15
Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, Tahun 2020.....	18
Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.....	22
Tabel 3.3 Persentase Perempuan Kawin usia 15-49 Tahun dan Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2020.....	26
Tabel 4.1 Rasio Murid Kelas dan Rasio Murid Guru Tahun 2018-2020.....	34
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.....	38
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 (%).....	40

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Atap, Dinding dan Lantai Terluas, 2020.....	46
Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Air Minum, 2020.....	47
Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Penerangan, 2020.....	47
Tabel 5.4 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Bahan Bakar Utama Memasak, 2020.....	48
Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso 2020.....	53
Tabel 6.2 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso 2020.....	54

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kabupaten Bondowoso Menurut Riwayat Melahirkan Anak Lahir Hidup, 2020.....	16
Grafik 3.1 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bondowoso 2011-2020 (tahun).....	23
Grafik 3.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Persentase Gangguan Sakit dan Persentase Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu, 2020.....	24
Grafik 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Sebelum 2 Tahun yang Lalu di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.....	26
Grafik 3.4 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan Pernah Diberi ASI di Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Lama Pemberian ASI Tahun 2020.....	27
Grafik 3.5 Persentase Balita di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian Imunisasi Lengkap Tahun 2020.....	29
Grafik 4.1 Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke Atas di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Pendidikan Tahun 2020.....	36
Grafik 4.2 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.....	37
Grafik 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2020.....	39
Grafik 5.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Rumah Yang Ditempati, 2020.....	45
Grafik 6.1 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2020.....	52





# BAB 1

## PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Umum

Berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian hal tersebut harus dilaksanakan perbaikan dan peningkatan berbagai program baik itu dibidang sosial, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Upaya tersebut tentunya harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar pembangunan di tahap berikutnya dapat berhasil dan lebih terarah. Namun hal tersebut tentunya tidak akan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung data yang benar dan baik guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan Indonesia kedepan.

Program pembangunan di Indonesia terutama di bidang sosial yang dilakukan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan penduduk. Dalam hal ini, sasaran dari program pembangunan adalah penduduk atau kelompok-kelompok penduduk sebagai subjek sekaligus objeknya. Melihat dari tujuan program, maka sasaran program dapat dibedakan atas perorangan, misalnya untuk meningkatkan status gizi balita, tingkat pendidikan (bersifat individu) dan untuk keluarga misalnya adalah program peningkatan pendapatan keluarga.

Keberhasilan suatu program dengan sendirinya tergantung dari sasaran program, yaitu perorangan dan keluarga, untuk memilih apakah akan berpartisipasi dalam suatu program pembangunan. Faktor luar yang juga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan perorangan dan keluarga dalam menanggapi program pembangunan yang ditujukan pada mereka adalah faktor masyarakat (berupa keadaan lingkungan, prasarana fisik, tingkat perekonomian komunitas, dan faktor budaya setempat), faktor kegiatan sektor swasta, dan faktor-faktor sosial ekonomi dan demografi dari perorangan dan keluarga.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Bondowoso 2020 ini merupakan kumpulan berbagai macam data statistik yang dipilih untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini.

Tidak semua indikator kesejahteraan rakyat dapat digambarkan disini, mengingat begitu kompleksnya dimensi sosial masyarakat dan tidak semua data yang tersedia dapat dikuantitatifkan. Untuk itu penyajian Inkesra Kabupaten Bondowoso ini akan mencakup data yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pembangunan (*output indikator*), dan dilengkapi dengan berbagai data lainnya yang tercakup dalam indikator input (*input indikator*) dan indikator proses (*process indikator*).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Berbagai data-data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan Inkesra disini menjadi komponen yang sangat penting sebagai tolok ukur untuk melihat dan menyusun rencana pembangunan kedepannya. Dalam tugasnya melaksanakan kegiatan statistik di berbagai bidang, Badan Pusat Statistik bertanggung jawab atas tersedianya data secara berkesinambungan guna melengkapi tujuan tersebut. Peran data disini sangatlah penting, karena dengan data hasil-hasil pembangunan dapat dilihat dan dievaluasi. Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Bondowoso ditinjau dari 7 aspek baik dari kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, serta indikator lainnya.

Tujuan yang ingin dicapai disini adalah memberikan gambaran dan bahan masukan serta evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan untuk tahun-tahun selanjutnya. Kebutuhan data kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesempatan kerja.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Inkesra Kabupaten Bondowoso tahun 2020 ini meliputi kondisi kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Kesejahteraan rakyat disini mengandung makna yang cukup luas, karena sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti PDRB per

kapita belum memadai untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan yang dimaksud. Dalam pengertian yang sangat luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara rinci. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek kesejahteraan yang dapat terukur (*measurable welfare*) saja. Oleh karena itu statistik tentang sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

#### **1.4. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2020 ini, adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2020, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020, dan publikasi Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021.

#### **1.5 Sistematika Penyajian**

Publikasi ini ingin mencoba menyajikan informasi dalam bentuk ulasan singkat untuk memberikan suatu gambaran tentang keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat sehingga bisa lebih mudah dipahami. Penyajiannya dibagi dalam enam kelompok indikator, yaitu: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, pengeluaran konsumsi, serta indikator lainnya.





# **BAB 2**

## **KEPENDUDUKAN**

<https://biodow.com/kab.bps.go.id>



## **BAB II**

### **KEPENDUDUKAN**

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dalam program pembangunan. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun disisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Pembangunan manusia dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penitikberatan pada kualitas SDM diperlukan karena penduduk yang besar hanya akan dapat menjadi aset pembangunan jika “kualitasnya” (dilihat dari derajat kesehatan dan atau tingkat pendidikan) cukup baik. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya merupakan beban pembangunan jika berkualitas rendah apabila dilihat dari komposisinya secara sosial dan budaya yang sangat beragam.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Ketersediaan data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

## 2.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	27 260	26 396	53 656	103
5-9	25 626	25 085	50 711	102
10-14	27 057	25 619	52 676	106
15-19	29 335	28 554	57 889	103
20-24	29 634	28 803	58 437	103
25-29	28 505	29 493	57 998	97
30-34	28 392	28 945	57 337	98
35-39	27 472	28 127	55 599	98
40-44	28 310	29 724	58 034	95
45-49	27 261	27 487	54 748	99
50-54	26 275	26 925	53 200	98
55-59	22 829	22 313	45 142	102
60-64	19 567	20 419	39 986	96
65-69	14 611	15 936	30 547	92
70-75	10 952	13 708	24 660	79
75+	9 140	16 391	25 531	56
<b>2020</b>	<b>382 226</b>	<b>393 925</b>	<b>776 151</b>	<b>97</b>

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021

Pada tahun 2020 BPS melakukan Sensus Penduduk di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bondowoso. Sensus Penduduk 2020 merupakan kegiatan 10 tahunan yang diadakan sejak tahun 1961. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus penduduk ke-7.

Tabel 2.1 menyajikan karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2020 sebesar 776.151 jiwa yang terdiri dari 382.226 laki-laki dan 393.925 perempuan sehingga menghasilkan Rasio Jenis Kelamin sebesar 97 persen, yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat 97 laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bondowoso didominasi oleh kaum Milenial. Kaum Milenial merupakan penduduk yang lahir pada tahun 1981-1996 atau sekarang berusia 25-40 tahun. Persentase kaum Milenial di Kabupaten Bondowoso sebesar 23,54 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelompok umur produktif mendominasi di Kabupaten Bondowoso.

Fenomena menarik terlihat dari rasio jenis kelamin per kelompok umur di Kabupaten Bondowoso, bahwa semakin meningkat usia rasio jenis kelamin cenderung menurun. Pada usia di bawah 20 tahun masih diatas 100 persen, semakin ke bawah semakin mengecil hingga hanya sebesar 56 persen di kelompok umur 75 tahun ke atas.

## **2.2 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk**

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk tercatat sebanyak 776.151 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan 436 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang mencapai 775.715 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bondowoso selama sepuluh tahun terakhir sebesar 0,52 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini tergolong laju pertumbuhan yang relatif kecil.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Dengan luas wilayah Kabupaten Bondowoso sekitar 1.560,10 kilometer persegi yang didiami oleh 776.151 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso adalah sebanyak 498 orang perkilometer persegi. Kecamatan terpadat di Kabupaten Bondowoso adalah Kecamatan Bondowoso, yaitu sebesar 3.300 penduduk per

kilometer persegi. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bondowoso merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga banyak penduduk yang memilih tinggal dan menetap di sini. Selain itu, terdapat Kecamatan Ijen dengan kepadatan penduduk yang paling rendah, yaitu sebesar 57 penduduk per kilometer persegi. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ijen merupakan kecamatan yang berada di dataran tinggi, dimana sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, sehingga akses penduduk untuk tinggal cukup sulit.

**Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bondowoso Per Kilometer Persegi, 2011-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Kilometer Persegi (Jiwa)
(1)	(2)	(4)
2020	776 151	498
2019	775 715	497
2018	772 297	495
2017	768 912	492
2016	765 094	490
2015	761 205	488
2014	756 989	485
2013	752 791	483
2012	748 127	480
2011	743 369	476

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021

### 2.3 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan Angka Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* yaitu perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Besarnya Angka Beban Ketergantungan ini menunjukkan beban ketergantungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin mengecil angka beban ketergantungan, akan semakin baik kondisi perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Dari tabel 2.3 nampak bahwa 69,36 persen penduduk Kabupaten Bondowoso merupakan

penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 20,24 persen dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 10,40 persen.

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2019-2020**

Tahun	Struktur Umur			Jumlah	Angka Beban Ketergantungan
	0-14	15-64	65 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	22,44	69,10	8,46	100,00	44,71
2020	20,24	69,36	10,40	100,00	44,17

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Bondowoso tahun 2020 sebesar 44,17 persen. Dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 44 orang penduduk yang tidak produktif, yang mana 32 orang diantaranya berasal dari kelompok muda (usia di bawah 15 tahun) dan 12 orang lainnya berasal dari kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun). Saat ini, bonus demografi sedang berlangsung di Kabupaten Bondowoso. Kondisi ini merupakan peluang yang cukup besar guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Bondowoso melalui nilai tambah yang diciptakan oleh penduduk usia produktif.

## 2.4 Fertilitas

Kelahiran (*fertilitas*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan

penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban pemerintah semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan.

Penduduk menurut status perkawinan penting untuk diketahui karena terkait dengan tingkat fertilitas suatu daerah. Semakin besar penduduk yang berstatus kawin memungkinkan tingkat fertilitas yang tinggi di suatu daerah tersebut.

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2020**

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	26,58	16,41	21,33
Kawin	69,60	65,46	67,47
Cerai *)	3,82	18,13	11,20
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rayat Kabupaten Bondowoso 2020

Keterangan: \*) termasuk cerai hidup dan cerai mati

Dari hasil Susenas 2020, Penduduk Kabupaten Bondowoso usia 10 tahun keatas berstatus kawin sebesar 67,47 persen, yang berstatus belum kawin sebesar 21,33 persen, sedangkan untuk yang berstatus cerai (termasuk cerai hidup dan cerai mati) sebesar 11,20 persen. Berdasarkan jenis kelamin baik penduduk laki-laki maupun perempuan usia 10 tahun ke atas mayoritas berstatus kawin.

Dalam setiap penelitian tentang kependudukan khususnya tentang pertumbuhan penduduk, peneliti biasanya langsung memusatkan kepada obyek penelitian yaitu penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas. Karakteristik yang akan dilihat antara lain, status perkawinan, usia perkawinan pertama, jumlah anak yang dilahirkan dan penggunaan alat kontrasepsi. Dengan mengetahui informasi tersebut tentunya akan lebih mudah untuk merencanakan program pembangunan, khususnya di bidang kependudukan.

Usia perkawinan pertama bagi perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda (rendah usia perkawinan pertama) akan semakin besar resiko

yang dihadapi selama kehamilan maupun saat melahirkan, baik bagi ibu maupun anak. Umur perkawinan pertama seseorang juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menambah penduduk di suatu daerah, semakin muda seseorang kawin maka semakin panjang masa reproduksinya sehingga akan memberikan peluang yang sangat besar terhadap jumlah anak yang akan dilahirkan.

**Tabel 2.5 Persentase Penduduk Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2019 – 2020**

<b>Umur Perkawinan Pertama (tahun)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(1)	(2)	(3)
< 17	45,60	43,04
17-18	25,15	24,46
19-24	25,19	27,79
25 +	4,07	4,71
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Beberapa hasil penelitian/kajian menemukan adanya pengaruh perkawinan penduduk usia dini sebagai penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Selain itu, usia perkawinan penduduk terutama perempuan yang belum cukup umur merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, serta tingginya angka perceraian terutama di pedesaan. Cukup beralasan apabila masalah perkawinan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk pada umumnya. Sebaliknya, baik buruknya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk baik secara ekonomi ataupun sosial merupakan faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya peristiwa atau kasus perceraian di kalangan penduduk.

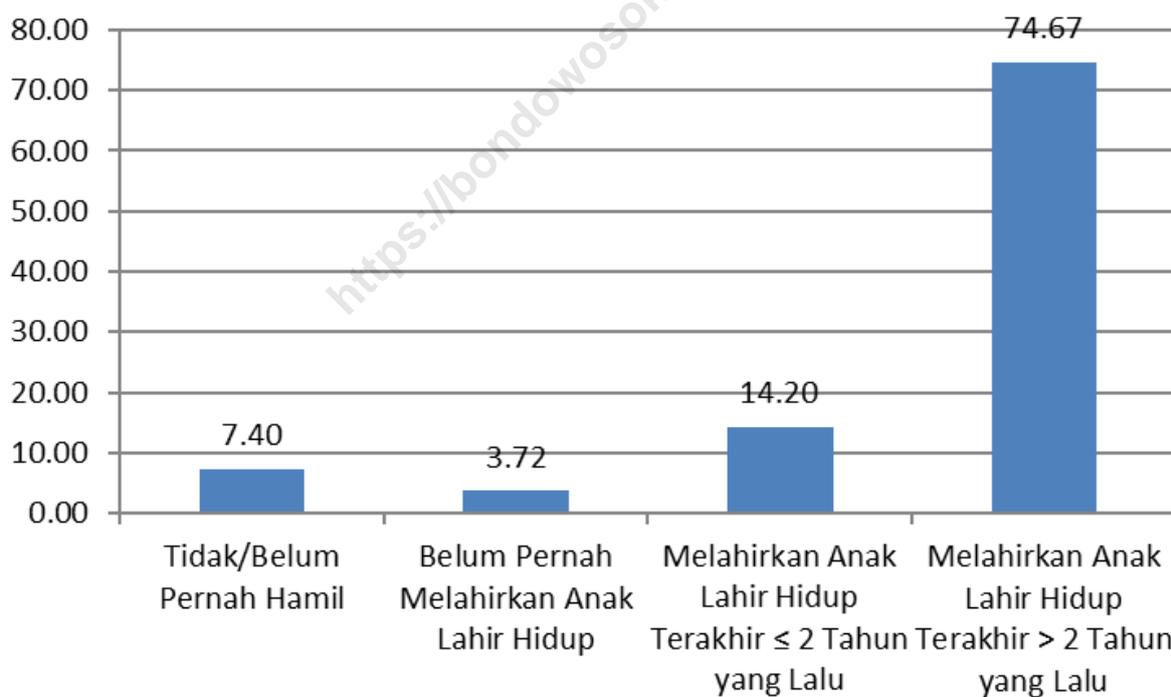
Pada tahun 2020, data menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang pernah kawin (10 tahun ke atas) di Kabupaten Bondowoso ternyata sebanyak 43,04 persen masih di

bawah usia 17 tahun ketika melakukan perkawinan pertamanya. Padahal pada usia tersebut seharusnya masih menempuh pendidikan setingkat SMA.

Berikutnya sebesar 24,46 persen perempuan yang pernah kawin melakukan perkawinan pada usia 17-18 tahun. Dan hanya sebesar 27,79 persen yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 19-24 tahun.

Grafik 2.1 menampilkan persentase penduduk perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun menurut riwayat melahirkan anak lahir hidup tahun 2020. Ternyata sebanyak 74,67 persen diantaranya melahirkan anak lahir hidup lebih dari 2 tahun yang lalu. Sebanyak 14,20 persen lainnya melahirkan anak lahir hidup kurang dari sama dengan 2 tahun yang lalu. Sisanya, 3,72 persen belum pernah melahirkan anak lahir hidup dan 7,40 persen tidak/belum pernah hamil.

**Grafik 2.1 . Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kabupaten Bondowoso Menurut Riwayat Melahirkan Anak Lahir Hidup, 2020**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

## 2.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur ( WUS ) dan Pasangan Usia Subur ( PUS ) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera

Program KB dilakukan dengan alat kontrasepsi yang jenisnya berbagai macam. Pemerintah selalu berharap cakupan akseptor KB terus mengalami peningkatan, terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

**Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, Tahun 2020**

(persen)

Alat Kontrasepsi/Cara KB	2020
(1)	(2)
MOW/Tubektomi	1,83
MOP/Vasektomi	0,71
AKDR/IUD/Spiral	3,75
Suntikan	54,91
Susuk KB/Norplan/Implan/ Alwalit	11,52
Pil KB	25,99
Kondom	0,76
Cara Tradisional	0,53

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB lebih dari separuhnya atau sekitar 54,91 persen memilih menggunakan suntikan. Kemudian sebesar 25,99 persen berikutnya lebih berminat dan memilih pil KB. Hanya sebesar 0,53 persen yang memilih cara tradisional.



**BAB 3**  
**KESEHATAN**



## **BAB III**

### **KESEHATAN**

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **3.1. Sarana Kesehatan**

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bondowoso ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Menurut data yang kami kumpulkan melalui cara kompilasi produk administrasi yang terangkum dalam buku Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021 maupun mengutip dari sumber di internet, tercatat rumah sakit umum sebanyak 3 unit, 1 unit rumah sakit bersalin, 25 unit puskesmas, 10 unit klinik/balai kesehatan, 1.085 unit posyandu, 150 unit poskesdes, dan 7 unit ponkeskel. Tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bondowoso untuk tahun 2020 sebanyak 80 dokter umum, 49 dokter spesialis, 39 dokter gigi, 1.119 perawat umum, 1 perawat SPK, 63 perawat gizi, 404 bidan, 241 bidan desa, dan 404 dukun bermitra.

**Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020**

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
<b>Prasarana Kesehatan</b>	
Rumah Sakit Umum	3
Rumah Bersalin	1
Puskesmas	25
Klinik/Balai Kesehatan	10
Posyandu	1 085
Ponkesdes	150
Ponkeskel	7
<b>Tenaga Kesehatan</b>	
Dokter Umum	80
Dokter Spesialis	49
Dokter Gigi	39
Perawat Umum	1 119
Perawat SPK	1
Perawat Gizi	63
Bidan	404
Bidan Desa	241
Dukun Bermitra	404

Sumber : Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021

### 3.2. Angka Harapan Hidup (AHH)

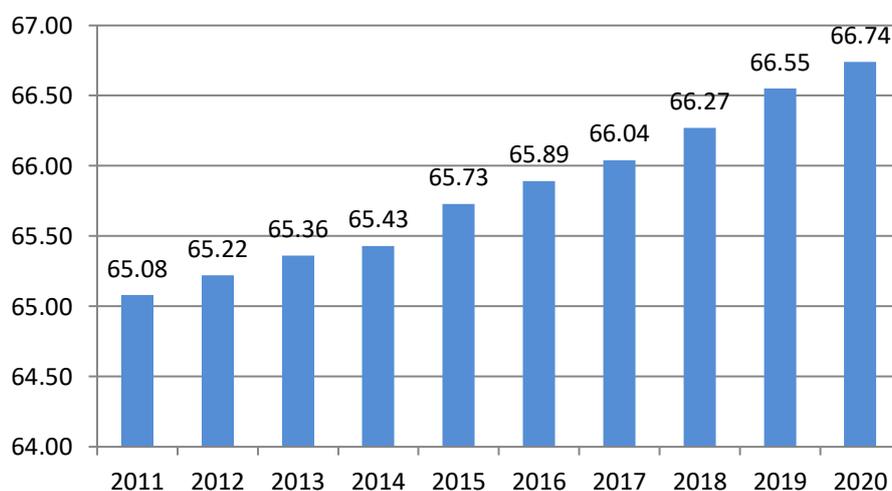
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan

dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Berdasarkan grafik 3.1 dapat dilihat bahwa umur harapan hidup di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2011 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2020 sebesar 66,74 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa setiap bayi di Kabupaten Bondowoso yang lahir hidup pada tahun 2020 mempunyai harapan untuk hidup selama 66,74 tahun. Dengan adanya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bondowoso, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

**Grafik 3.1 . Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bondowoso 2011-2020 (tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso 2020

### 3.3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

**Grafik 3. 2 Presentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Persentase Gangguan Sakit dan Presentase Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu, 2020**

Uraian	Jumlah
<b>Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir (%)</b>	
<b>Laki-Laki</b>	
Ada Keluhan	39,09
Tidak Ada Keluhan	60,91
<b>Perempuan</b>	
Ada Keluhan	40,21
Tidak Ada Keluhan	59,79
<b>Gangguan Sakit (Keluhan Kesehatan) (%)</b>	
<b>Laki-Laki</b>	
Ada Gangguan Sakit	46,11
Tidak Ada Gangguan Sakit	53,89
<b>Perempuan</b>	
Ada Gangguan Sakit	45,53
Tidak Ada Gangguan Sakit	54,19
<b>Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu (%)</b>	
1-3	53,15
4-6	25,45
7-29	21,12
30+	0,29

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Berdasarkan hasil susenas 2020, sekitar 39,09 persen penduduk laki-laki di Kabupaten Bondowoso dan 40,21 persen penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan (referensi survei dalam sebulan yang lalu). Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah panas, batuk, pilek, diare, pusing, dan penyakit kronis. Dari yang mempunyai keluhan kesehatan di atas, 46,11 persen (laki-laki) dan 45,53 persen (perempuan) mengaku mengalami gangguan sakit. Jumlah hari rawat inap dalam setahun yang lalu persentase terbesar sebanyak 1-3 hari (53,15 persen).

### 3.4. Penolong Kelahiran

Perkembangan anak pada masa balita akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang saat mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan balita dimulai dari kesehatan ibu, tenaga penolong pada saat lahir, pemberian ASI dan imunisasi. Keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan selalu berkaitan dengan penolong persalinan yang membantu proses kelahiran tersebut. Dalam proses kelahiran penolong terbaik kelahiran adalah tenaga medis (dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lain) atau orang yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan persalinan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan *neonatal*, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di setiap desa.

Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Keberadaan tenaga medis seperti dokter dan bidan yang ditunjang dengan sarana/peralatan yang memadai, akan sangat menolong pada saat proses kelahiran. Dokter dan bidan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam proses kelahiran terutama pada saat di mana kelahiran mempunyai resiko kematian yang tinggi terhadap ibu dan anak. Sehingga diharapkan tingkat kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran dapat terus menurun.

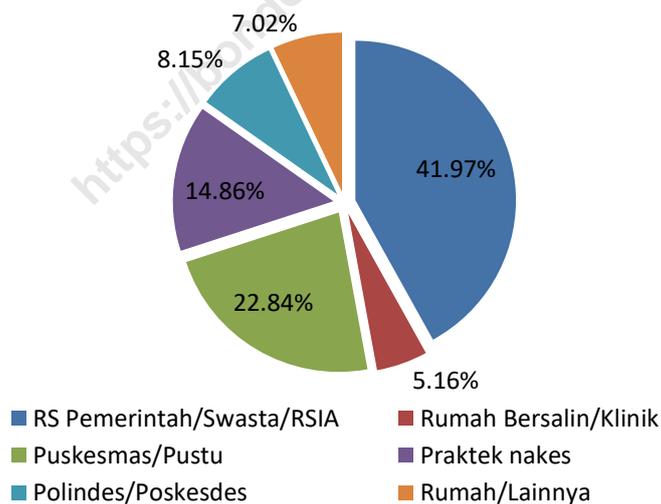
Berdasarkan tabel 3.3 tercatat bahwa penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Bondowoso tahun 2020 di dominasi oleh tenaga kesehatan yaitu bidan sebesar 61,25 persen dan dokter kandungan sebesar 35,79 persen. Dan hanya sebesar 2,96 persen perempuan yang pernah kawin usia 15 -49 tahun menggunakan dukun beranak sebagai penolong kelahiran terakhir pada anak lahir hidup terakhir tahun 2020.

**Tabel 3.3**  
**Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 – 49 Tahun dan**  
**Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir**  
**di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2020**

Penolong Kelahiran Terakhir	2020
(1)	(2)
Dokter Kandungan	35,79
Bidan	61,25
Dukun Beranak	2,96

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

**Grafik 5.1.**  
**Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun dan Tempat Melahirkan**  
**Anak Lahir Hidup Terakhir Sebelum 2 Tahun yang Lalu, 2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Berdasar grafik 5.1 Hasil Susenas 2020 diperoleh gambaran sebanyak 41.97 persen perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun melahirkan di RS Pemerintah/Swasta/RSIA, khususnya pada kelahiran anak lahir hidup terakhir sebelum 2 tahun yang lalu. Sebanyak 22,84 persen lainnya melahirkan di Puskesmas/Pustu; 14,86 pesen melahirkan di Praktek

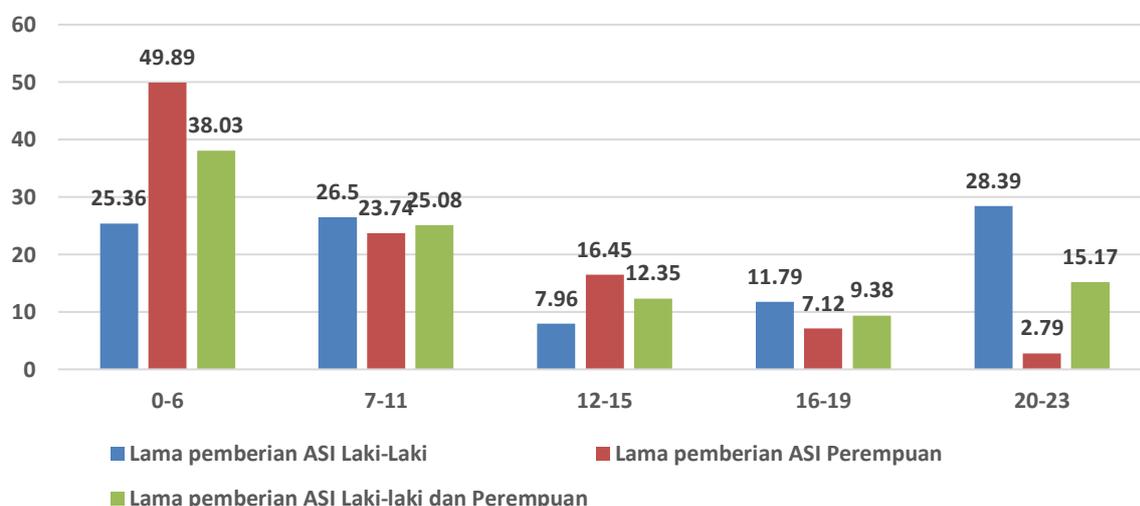
Nakes; 8,15 persen melahirkan di Polindes/Poskesdes; 7,02 persen melahirkan di Rumah Lainnya; dan 5,16 persen melahirkan di Rumah Bersalin/Klinik.

### 3.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bayi berumur 6 bulan ke bawah, selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk seluruh gizi bayi pada enam bulan pertama kehidupannya. Selain itu bayi yang diberi ASI memiliki kekebalan lebih tinggi terhadap penyakit. Pada umur 6-12 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi, karena mengandung lebih dari 60 persen kebutuhan gizi bayi. Pemberian ASI yang ideal adalah sampai anak berumur 24 bulan.

Berdasarkan grafik 3.4 diketahui bahwa pada tahun 2020, bayi di Kabupaten Bondowoso yang disusui dari 0 sampai 6 bulan masih cukup banyak yaitu sebesar 38,03 persen. Sedangkan 25,08 persen anak yang pernah mendapatkan ASI pada umur 7 sampai 11 bulan dan sebanyak 12,35 persen anak yang pernah mendapatkan ASI antara umur 12 – 15 bulan. Namun, hanya sebesar 9,38 persen saja yang pernah mendapatkan ASI usia 16 hingga 19 bulan dan sebesar 15,17 persen saja yang pernah mendapatkan ASI pada usia 20 hingga 23 bulan.

Grafik 3.4  
Persentase Anak Usia 0-23 Bulan Pernah Diberi ASI di Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Lama Pemberian ASI, 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

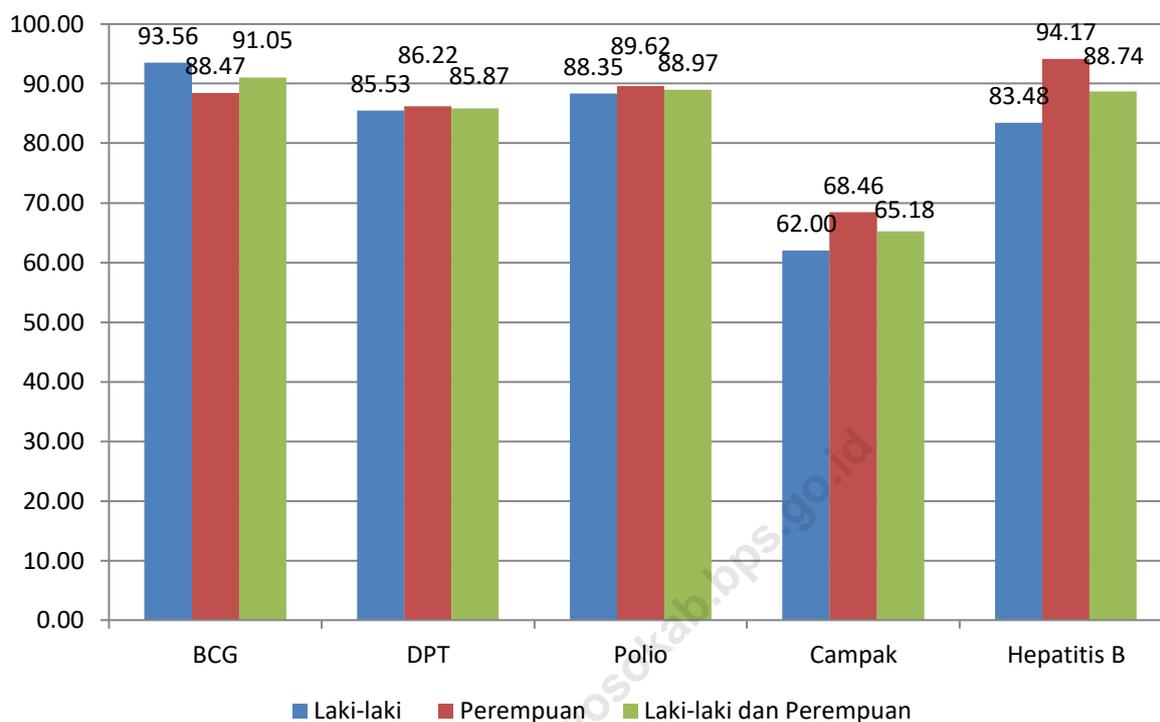
Tingkat kesadaran akan pentingnya ASI bagi anak harus terus di sampaikan kepada masyarakat di tengah gencarnya promosi akan susu formula. Terutama pemberian informasi kepada ibu-ibu yang kegiatan utamanya bekerja, karena di tengah kesibukannya, ibu-ibu pekerja tersebut cenderung mempercayakan kebutuhan gizi anaknya dengan susu formula.

### **3.6. Imunisasi Balita**

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak. Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Dengan imunisasi yang lengkap dan makanan yang bergizi diharapkan akan terbentuk generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Grafik 3.5  
 Persentase Balita di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian  
 Imunisasi Lengkap, 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Berdasarkan grafik 3.5, persentase imunisasi pada bayi pada tahun 2020 berada di atas 60 persen. Pada tahun 2020, persentase imunisasi tertinggi adalah BCG dengan total (laki-laki dan perempuan) sebanyak 91,05 persen. Persentase imunisasi DPT, Polio, dan Hepatitis B mencapai di atas 80 persen, masing-masing 85,87 persen; 88,97 persen; dan 88,74 persen. Kemudian diikuti persentase Campak sebesar 65,18 persen.





## **BAB 4**

# **PENDIDIKAN**



## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN**

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Bondowoso menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada

indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah.

#### 4.1. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid guru dan rasio murid kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.

**Tabel 4.1 Rasio Murid Kelas dan Rasio Murid Guru  
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat SD sederajat			
Rasio murid sekolah	107,11	104,51	103,31
Rasio murid guru	10,40	9,80	11,17
Tingkat SLTP sederajat			
Rasio murid sekolah	143,21	127,46	126,04
Rasio murid guru	9,81	9,53	14,48
Tingkat SLTA sederajat			
Rasio murid sekolah	210,69	164,89	184,69
Rasio murid guru	12,93	11,43	17,03

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021

Dikarenakan data jumlah kelas menurut jenjang pendidikan belum tersedia secara menyeluruh, maka data rasio murid kelas tidak dapat tersedia pula, tetapi data rasio murid sekolah dapat kami tampilkan. Menurut Tabel 4.1 rasio murid guru untuk jenjang sekolah

dasar sederajat di Kabupaten Bondowoso tahun 2020 adalah 1 berbanding 11,17. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap 1 orang guru SD sederajat mengajar rata-rata sebanyak 11-12 murid. Rasio murid guru untuk jenjang SLTP sederajat sebesar 1 banding 14,48, sedangkan rasio untuk jenjang SLTA (1 : 17,03). Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap 1 orang guru SMP sederajat mengajar rata-rata sebanyak 14-15 murid, sedangkan untuk SMA sederajat mengajar rata-rata sebanyak 17 murid. Untuk rasio murid sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula rasionya. Adapun rasio murid sekolah jenjang SD sederajat pada tahun 2020 mencapai 1 berbanding 103,31, untuk jenjang SLTP sederajat mencapai 1 berbanding 126,04 dan untuk jenjang SLTA sederajat mencapai 1 banding 184,69.

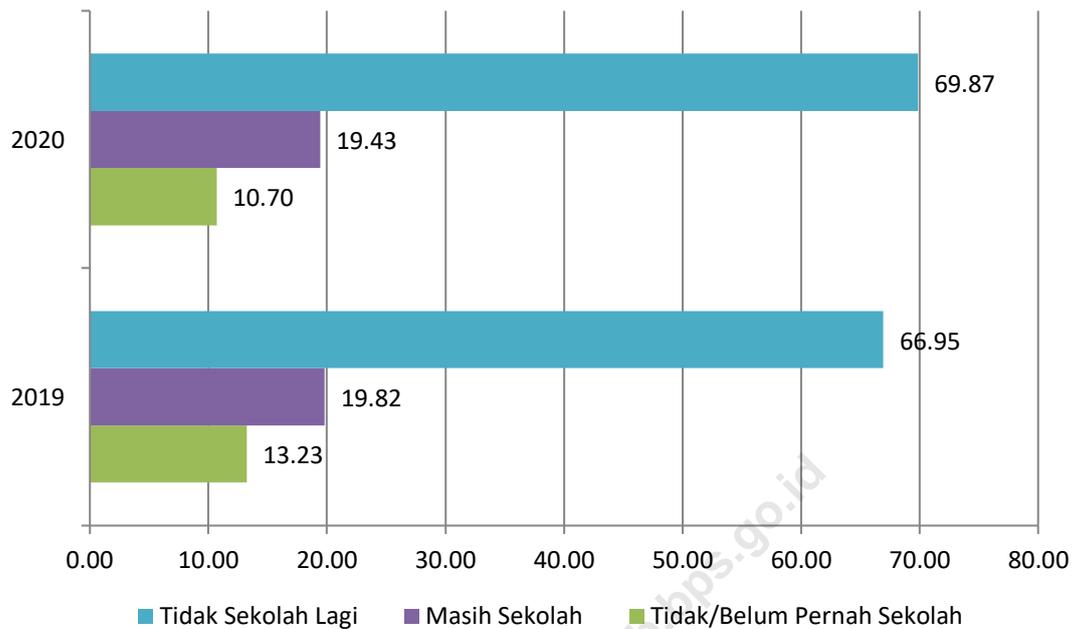
#### **4.2 Partisipasi Sekolah**

Dalam hal partisipasi sekolah, dapat dikatakan bahwa mereka yang mempunyai pendapatan tinggi memiliki kemungkinan/peleuang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan tingkat kesejahteraannya.

Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat dan juga keluarga. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan indikator tersedianya tenaga terdidik atau sumber daya manusia terdidik yang tersedia saat ini. Besaran ini ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah penduduk yang berusia 5 tahun ke atas yang berasal dari hasil Susenas, diantaranya menyajikan persentase partisipasi bersekolah yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Grafik 4.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk Kabupaten Bondowoso usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah menurun dibanding tahun 2019. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah sebesar 13,23 persen pada tahun 2019, turun menjadi 10,70 persen tahun 2020. Konsekuensinya persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak sekolah lagi meningkat dari 66,95 persen di tahun 2019 menjadi 69,87 persen di tahun 2020. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang masih bersekolah menurun, yaitu dari 19,82 persen di tahun 2019 turun menjadi 19,43 persen di tahun 2020.

**Grafik 4.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Pendidikan Tahun 2020**



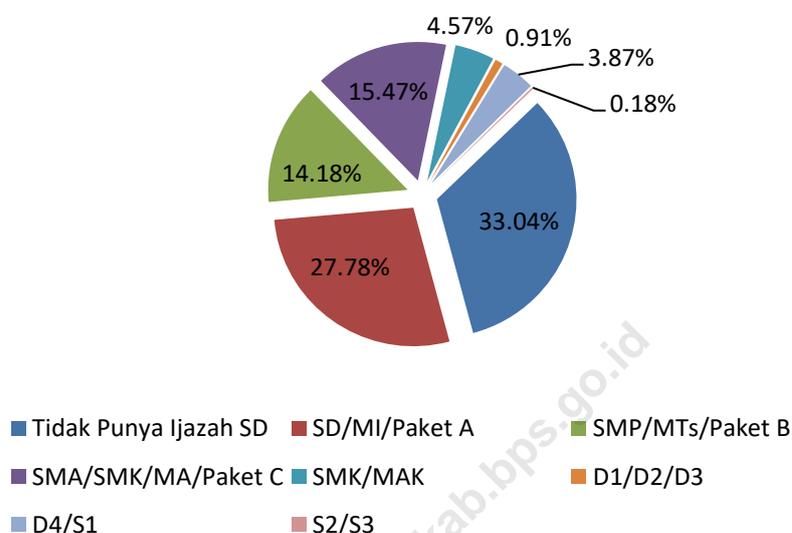
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

#### 4.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Bondowoso tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 33,04 persen dan hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sederajat mencapai 27,78 persen. Untuk penduduk 15 tahun ke atas yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat mencapai 14,18 persen. Dengan demikian, sebanyak 75 persen penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP sederajat ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SMA ke atas hanya 20,04 persen, sedangkan tamat diploma/sarjana hanya sebesar 4,96 persen.

**Grafik 4.2**  
**Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas**  
**Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan**  
**di Kabupaten Bondowoso 2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

#### 4.4 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara harfiah, angka melek huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arab/Braile.

Angka Melek Huruf diperoleh dengan membagi banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Persentase penduduk yang dapat baca tulis di Kabupaten Bondowoso tahun 2020 menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 adalah sebesar 82,18 persen dan sebanyak 17,82 persen masih belum bisa baca tulis (buta huruf).

**Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020**

Dapat Baca Tulis Huruf	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Latin/Arab/Lainnya	88,82	76,03	82,18
Tidak Bisa	11,18	23,97	17,82

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kemampuan membaca/menulis huruf latin, arab atau lainnya, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibanding perempuan. Penduduk laki-laki 15 tahun ke atas yang sudah melek huruf sebanyak 88,82 persen, sementara penduduk perempuan baru 76,03 persen. Dengan kata lain penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf hanya 11,18 persen sedangkan penduduk perempuan yang buta huruf mencapai 23,97 persen. Tingginya angka buta huruf penduduk perempuan dimungkinkan adalah penduduk yang berusia lanjut, karena pada masa lalu pendidikan bagi kaum laki-laki lebih diutamakan dibanding perempuan.

#### 4.5 Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah

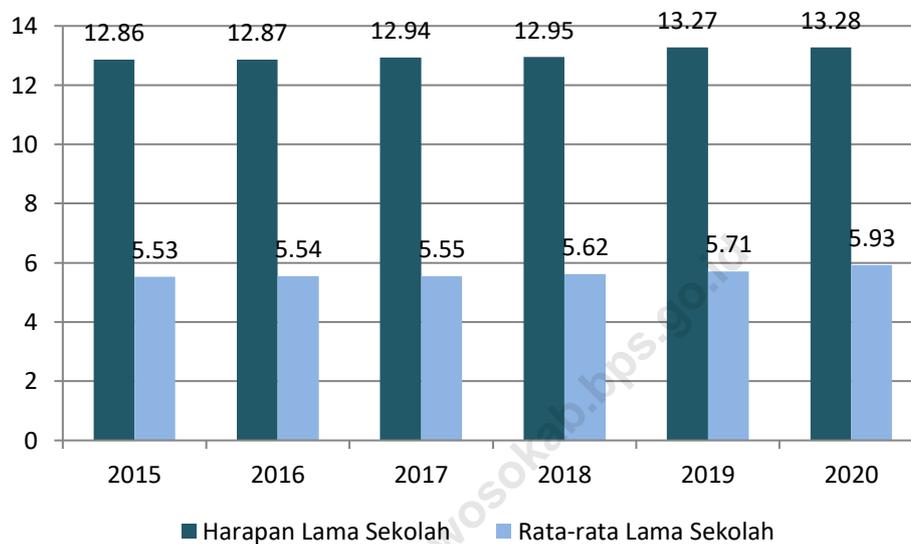
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

HLS digunakan sebagai salah satu variabel ukuran dalam aspek pendidikan untuk penghitungan IPM, yaitu untuk menghitung Indeks Pendidikan, yang sebelumnya menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH). AMH sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu BPS mengganti ukuran AMH dengan ukuran HLS untuk penghitungan Indeks Pendidikan.

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah

penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 12,86 tahun kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 13,28 tahun pada tahun 2020. Ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

**Grafik 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2020**



Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Bondowoso, 2020

Terbatasnya anggaran pendidikan dari pemerintah seringkali menjadi dilema, target pencapaian rata-rata lama bersekolah penduduk harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua rumah tangga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga pendidikan tinggi, semakin mahal biaya sekolah menyebabkan sebagian orangtua terpaksa memutuskan kelangsungan sekolah anak-anaknya dan diarahkan membantu ekonomi keluarga.

Sejalan dengan angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, meskipun baru pada taraf pendidikan SD. Berdasarkan grafik 4.3 rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso tahun 2020 sebesar 5,93 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata rata penduduk Kabupaten Bondowoso usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas 5 (Sekolah Dasar).

#### 4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Secara umum, APS kelompok usia 7-12 tahun Bondowoso tahun 2020 sebesar 99,68 yang berarti bahwa 99,68 persen penduduk Bondowoso usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Bondowoso tahun 2020 sebesar 97,71 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Bondowoso usia 13-15 tahun sebanyak 97,71 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Bondowoso tahun 2020 sebesar 71,83 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 28,17 persen penduduk Bondowoso usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SLTA

**Tabel 4.3 Penduduk Menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 (%)**

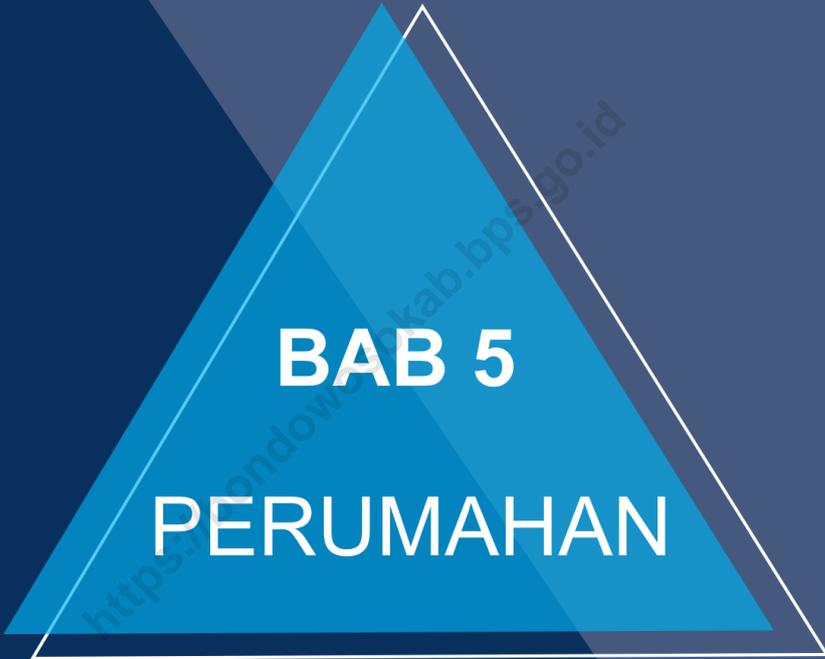
Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	0,32	99,68	0,00
13-15	0,28	97,71	2,01
16-18	0,00	71,83	28,17
19-24	0,50	16,08	83,42

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Dari tabel diatas dapat dapat dilihat banyaknya penduduk pada kelompok umur 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah lagi mencapai 2,01 persen. Dan lebih dari sepertiga atau sekitar 28,17 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi. Bahkan untuk kelompok umur 19-24 tahun tercatat sebanyak 83,42 persen penduduknya sudah tidak bersekolah lagi.

<https://bondowosokab.bps.go.id>





**BAB 5**

**PERUMAHAN**

<https://windows.kab.bps.go.id>



## BAB 5

### PERUMAHAN

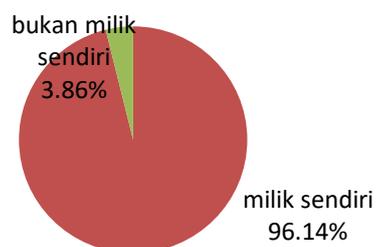
Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan relatif sulit pemecahannya karena berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan pembiayaan pembangunan perumahan yang cukup besar.

Program pemerintah yang menyangkut bidang perumahan terus ditingkatkan, bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi kualitas dan harga yang terjangkau. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang pesat menjadikan kebutuhan rumah semakin meningkat pula. Sementara luas wilayah daratan tak bisa bertambah, maka pembukaan lahan untuk kepentingan pemukiman harus tetap mempertimbangkan faktor keamanan bagi semua pihak. Lahan pertanian yang disulap menjadi daerah permukiman tentu akan berakibat berkurangnya produksi pangan yang bisa dihasilkan oleh lahan tersebut. Belum lagi lahan produktif yang diubah fungsinya menjadi industri atau infrastruktur akan menyita sumber daya air dalam tanah.

#### 5.1. Status Kepemilikan dan Keterangan Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020, sebagian besar berstatus milik sendiri atau sebesar 96,14 persen. Persentase rumah tangga dengan status rumah bukan milik sendiri (rumah dinas, kontrak/sewa, dan bebas sewa) sebesar 3,86 persen.

**Grafik 5.1. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Rumah Yang Ditempati, 2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2020

**Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso  
Menurut Jenis Atap, Dinding dan Lantai Terluas, 2020**

Keterangan Bangunan	Persentase
(1)	(2)
<b>❖ Jenis Atap Terluas</b>	
Asbes, Seng	3,70
Beton	0,98
Genteng (Keramik, Metal, Tanah Liat)	95,32
<b>❖ Jenis Dinding Terluas</b>	
Tembok	63,08
Plesteran Anyaman Bambu	1,39
Kayu/Batang Kayu	19,10
Bambu/Anyaman Bambu	16,43
<b>❖ Jenis Lantai Terluas</b>	
Bukan Tanah	84,40
Tanah	15,60

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

Jenis atap terluas masih didominasi atap Genteng dengan persentase 95,32 persen diikuti atap berjenis lainnya. Sedangkan jenis dinding terluas masih didominasi oleh jenis dinding tembok sebesar 63,08 persen. Jenis lantai terluas didominasi dengan lantai bukan tanah sebesar 84,40persen sedangkan lantai tanah hanya sebesar 15,60 persen.

## **5.2. Keterangan Sumber Air Minum**

Sumber air minum yang paling banyak dipakai warga adalah menggunakan sumur bor sebesar 32,59 persen dan sumur terlindung sebesar 24,82 persen. Masih kurangnya pengguna sumber air minum ledeng baik meteran maupun eceran dan juga pengguna sumur sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan pemerintah setempat untuk peningkatan layanan air bersih untuk warga setempat.

**Tabel 5.2. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Air Minum, 2020**

Sumber Air	Persentase
(1)	(2)
<b>❖ Sumber Air Minum</b>	
Air Kemasan Bermerk	1,48
Air Isi Ulang	3,72
Leding	9,81
Sumur Bor	32,59
Sumur Terlindung	19,43
Sumur Tak Terlindung	1,39
Mata Air Terlindung	24,82
Mata Air Tak Terlindung	6,77

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

### 5.3. Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Sumber penerangan yang digunakan warga sebesar 98,37 persen adalah menggunakan listrik PLN. Penggunaan Elpiji 3 Kg untuk bahan bakar sangat memasak yaitu sebesar 53,91 persen, pengguna kayu bakar sebesar 43,20 persen menempati urutan yang kedua karena wilayah Bondowoso banyak hutan.

**Tabel 5.3. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Penerangan, 2020**

Sumber Penerangan	Persentase
(1)	(2)
Listrik PLN	98,37
Listrik non PLN	1,63

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

**Tabel 5.4. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso  
Menurut Jenis Bahan Bakar Utama Memasak, 2020**

<b>Bahan Bakar</b>	<b>Persentase</b>
(1)	(2)
Listrik	0,67
Elpiji 5,5 Kg	1,12
Elpiji 12 Kg	0,53
Elpiji 3 Kg	53,91
Kayu Bakar	43,20
Tidak Memasak di Rumah	0,01

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020



**BAB 6**

**LAINNYA**



## BAB 6

### INDIKATOR LAINNYA

#### 6.1. Pengeluaran Penduduk

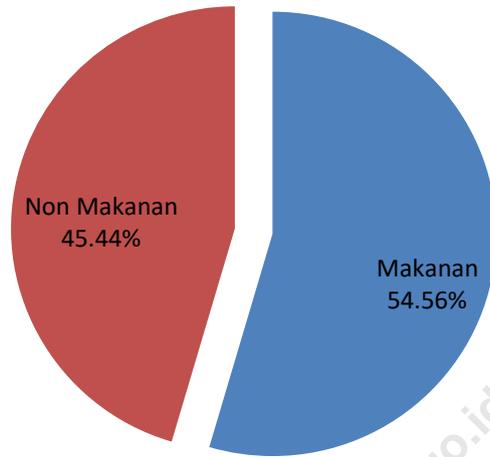
Tingkat penghasilan masyarakat di suatu wilayah dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Namun demikian sampai sejauh ini data mengenai pendapatan amat sulit didapat, terutama dalam hal keakuratan data. Oleh sebab itu untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Masyarakat Bondowoso rata-rata pengeluarannya terbesar pada makanan sebesar 54,56 persen, sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar 45,44 persen.

Makanan dan minuman jadi mendominasi pengeluaran bahan makanan, yaitu sebesar 149.450 rupiah per kapita atau sebesar 33,91 persen. Masyarakat Bondowoso banyak yang lebih senang membeli makanan dan minuman jadi dan bisa melayani antar pesanan sampai konsumen. Padi-padian menduduki porsi kedua yaitu 14,60 persen, sedangkan pengeluaran yang paling rendah adalah umbi-umbian hanya 0,72 persen. Terkenal masyarakat Bondowoso sangat menyukai sayur-sayuran dan ini terbukti pengeluaran sayur-sayuran mencapai 7,48 persen. Tradisi makan sirih dan kebiasaan merokok tetap tinggi terlihat dari 12,55 persen dari pengeluaran bahan makanan.

Untuk pengeluaran bukan makanan, perumahan dan fasilitas rumah tangga mendapat porsi yang cukup tinggi (42,19 persen) dibandingkan yang lain. Pengeluaran aneka barang dan jasa menduduki urutan kedua yakni sebesar 23,08 persen dari pengeluaran non makanan. Adapun pengeluaran yang paling rendah untuk pengeluaran non makanan adalah pengeluaran keperluan pesta.

**Grafik 6.1. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan  
di Kabupaten Bondowoso, 2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

**Tabel 6.1. Rata-rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan  
di Kabupaten Bondowoso 2020**

<b>Pengeluaran Makanan Per Kapita (Rupiah)</b>	
Padi-Padian	64 352
Umbi-Umbian	3 165
Ikan	22 946
Daging	13 056
Telur dan Susu	20 596
Sayur-Sayuran	32 977
Kacang-Kacangan	15 901
Buah-Buahan	16 114
Minyak dan Lemak	12 939
Bahan Minuman	17 543
Bumbu-Bumbuan	8 253
Konsumsi Lainnya	8 102
Makanan & Minuman Jadi	149 450
Tembakau dan Sirih	55 313
<b>Total Pengeluaran Makanan</b>	<b>440 710</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

**Tabel 6.2 Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan  
di Kabupaten Bondowoso 2020**

<b>Pengeluaran Makanan Per Kapita (Rupiah)</b>	
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	154 889
Aneka Barang dan Jasa	84 727
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	28 618
Barang Tahan Lama	63 583
Pajak & Asuransi	27 738
Keperluan Pesta	7 482
<b>Total Pengeluaran Bukan Makanan</b>	<b>367 036</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



*BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BONDOWOSO*

Jl. Santawi No.114 Bondowoso  
Telp : (0332) 421775, Fax: (0332) 432331  
Homepage: <https://bondowosokab.bps.go.id>  
Email : [bps3511@bps.go.id](mailto:bps3511@bps.go.id)

